



Implementasi BUMDes Terhadap Pengembangan Perekonomian di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima

Maemunah¹, Ahmad Efendi²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: maemunahabdullah@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: ahmadefendi12@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 09-Maret-2019

Disetujui: 20-Maret-2019

Kata Kunci:

implementasi
BUMDes
pengembangan
perekonomian

ABSTRAK

Abstrak Pilar yang menjadikan Desa lebih mandiri dan produktif mengelola potensi Desa sebagai PADes adalah BUMDes. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa yaitu oleh Desa, dari Desa, dan untuk Desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik penentuan subyek menggunakan *purposive sampling*, jenis data yang digunakan data kualitatif, sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui, reduksi, display, verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh BUMDes dalam memanfaatkan anggaran yang ditetapkan oleh kepala Desa sebagai modal usaha BUMDes, BUMDes telah melaksanakan tiga program antara lain; 1). Penggemukan Sapi 2). Pengadaan Pestisida 3). Simpan Pinjam. Program yang sudah diimplementasikan sudah ada perkembangan yang cukup Baik terhadap pengembangan perekonomian Desa salah satu sumber PADes. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes antara lain; 1). Pelatihan/pembinaan 2). Pengadaan pakan ternak 3). Kesadaran masyarakat dan 4). Anggaran yang ditetapkan minim.

Abstract: *The pillar that makes the village more independent and productive in managing the village's potential as PADes is BUMDes. The management of BUMDes is fully implemented by the Village community, namely by the Village, from the Village, and for the Village. The workings of BUMDes are by accommodating economic activities of the population in the form of institutions or business entities that was professionally managed but still rely on the original potential of the Village. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach, the technique of determining subjects using purposive sampling, the type of data used is qualitative data, data sources consist of secondary data and primary data, data collection methods used are observation, interviews, and documentation, while analysis techniques data used is through, reduction, display, verification. The results of the study show that the BUMDes' implementation of economic development in the Soromandi Sub-District of Sai Village in Bima Regency has made several efforts made by the BUMDes to utilize the budget set by the village head as the business capital of the BUMDes 1). Cow Fattening 2). Procurement of Pesticides, 3). Savings and Loan. The program implemented already has a reasonably good development towards the development of the village economy, one of the sources of PADes. Some of the obstacles faced by BUMDes include; 1). Training/coaching, 2). Procurement of animal feed 3). Community awareness, 4). The budget set is minimal.*

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi, merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia serta saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna

keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah Pedesaan[1].

Amanat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal

usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk juga pengelolaan BUMDes secara profesional[2]. Arti penting pembangunan pedesaan adalah dengan menempatkan Desa sebagai sasaran pembangunan untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota dapat diwujudkan. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli.

Masalah pengembangan ekonomi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia, ekonomi desa, potensi desa dan pengelolaan manajemen desa. Berdasarkan temuan peneliti sebelumnya menunjukkan peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel[3].

Pemahaman aparat desa dalam mengimplementasikan UU No.23 tahun 2014 belum mencakup secara spesifik mengenai pengaturan Desa/Kelurahan, maka peraturan tersebut dijabarkan kembali dengan lebih spesifik dalam UU No. 6 tahun 2014 yang didalamnya pada pasal 18 dimana desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena keterbatasan kemampuan. Karena banyaknya tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang diemban atau dimiliki oleh desa maka perlu jalan keluar terbaik dengan langkah strategis yang lebih optimal dalam menggenjot pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan sehingga diharapkan tujuan kemakmuran bersama dapat diperoleh secara lebih komprehensif[4].

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh kepala Desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan legislatif. Pemerintahan Desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan Desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli Desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi Desa dengan maksimal, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

BUMDes sebagai lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di Pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Di samping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di Pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes diatur dalam [5] Pasal 87 ayat 1 menyatakan Desa dapat mendirikan BUMDes, dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam peraturan menteri Desa, pembangunan [6] menjelaskan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUMDes hampir merata, dalam pengelolaannya BUMDes ada yang secara mandiri dalam mengembangkan potensi Desa, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulant permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat Desa dan menjadi saham dalam BUMDes. Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-Undang Desa sudah memberikan peluang untuk menggerakkan perekonomian di Desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa Desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu Desa di kabupaten Bima adalah Desa Sai yang telah mendirikan BUMDes. Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima berjumlah 7 (tujuh) Desa yang keseluruhan Desa telah membentuk BUMDes. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya BUMDes merupakan hajat hidup orang banyak yang akan menampung aspiratif dalam bentuk kreatifitas masyarakat Desa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima Tahun 2014, dari 7 (enam) jumlah Desa di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Desa Sai merupakan Desa yang angka penduduknya paling tinggi dibandingkan dengan Desa lain. Pelaksanaan dan implementasi BUMDes yang tidak maksimal dan sering terjadinya penggunaan dana BUMDes yang tidak efektif peneliti

tertarik meneliti tentang Implementasi BUMDes terhadap Pengembangan Perokonomian Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian desa, dan mengetahui kendala dalam implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian desa.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang kemukakan [7] penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai social dan sejarah dengan tujuan membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Sedangkan menurut [8] paradigma kualitatif ialah suatu penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau social dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi serta dilakukan dengan latar (setting) yang alamiah.

Data deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan serta mempelajari implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa [9].

Penelitian merupakan cara yang digunakan manusia untuk mengetahui gejala-gejala serta memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban terhadap masalah yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan sosial dengan melakukan pengumpulan, klasifikasi dan analisis, pengolahan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan [10] Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. [11]

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa, BPD, BUMDes dan Masyarakat setempat.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dibagi menjadi dua [12] yaitu 1) Data kualitatif adalah data yang berhubung dengan karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata; 2) Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka atau hitungan statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data yang berbentuk kalimat, kata-kata, gambar atau data yang ditanyakan dalam bentuk tanggapan atau pernyataan tentang Implementasi BUMDes terhadap Pengembangan Perokonomian Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Sumber data dalam penelitian kualitatif digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder [13]. a) Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama; b) Sumber data sekunder adalah sumber mengutip dari sumber lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan subyek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pencatatan dokumen penelitian tentang implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang prosesnya diarahkan pada kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang akan diteliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga bisa mendapatkan informasi yang baru dan mengembangkan informasi awal. Terdapat dua model wawancara yakni; 1). wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan intrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada informan. 2). wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan yang mendalam. Dokumen merupakan sumber data yang melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar dan karya-karya lainnya yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian [14].

Teknik observasi digunakan untuk melakukan pengamatan yang mendalam dan secara akurat terhadap implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa Sai. Untuk mendapatkan data yang lebih rinci peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dengan

wawancara terstruktur peneliti menyusun terlebih dulu pertanyaan yang akan diajukan pada informan untuk menguatkan informasi yang ingin peneliti dapatkan dan wawancara tak terstruktur juga akan membantu peneliti menggali informasi lebih dalam kepada informan, peneliti juga mengembangkan pertanyaan seiring berjalannya wawancara nantinya. Saat melakukan wawancara, peneliti menggugurkan alat bantu record video untuk membantu penyusunan skripsi. Konsep wawancara akan peneliti lampirkan dihalaman lampiran. Sedangkan dokumentasi yang peneliti lakukan adalah foto, rekaman dan data yang berkaitan dengan implementasi bumdes terhadap pengembangan perekonomian Desa Sai.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab[14]. Teknik analisis data yang digunakan adalah tiga tahapan yakni; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing*)[15].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi BUMDes Terhadap Pengembangan Perekonomian Desa

Implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa, bahwa BUMDes Sai telah mengimplementasi beberapa program yaitu penggemukan sapi, pengadaan pestisida dan simpan pinjam.

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dari amanat Undang-Undang tersebut pemerintah Desa Sai telah membentuk BUMDes pada tahun 2007, yang diketuai oleh Ustadz Edi Wibowo S.Pdi, BUMDes saat itu hanya bergerak dibidang simpan pinjam dengan modalnya dari daerah kabupaten Bima. Setelah berlanjut sampai 2015-2016 Desa membentuk kepengurusan baru yang diketuai oleh Ramdin S.H., setelah anggarannya dicairkan kepengurus baru BUMDes tidak berkembang dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Selanjutnya dibentuk BUMDes yang baru ditahun 2017 yang diketuai oleh Najamudin, Sampai sekarang masih beroperasi.

Desa Sai memiliki beberapa potensi yang terkandung didalamnya antara lain potensi dibidang pertanian yang memiliki keunggulan dibandingkan Desa yang lain di Kecamatan Soromandi seperti, bawang merah, jagung dan padi. Setiap tahunnya Desa Sai bisa menghasilkan 980 ton pertahun bawang merah, jagung 370 ton pertahun, padi 580 ton pertahun. Selain memiliki komoditif dibidang pertanian masyarakat Desa Sai memiliki hasil peternakan seperti sapi, kerbau, kambing, kuda dan ayam. Desa Sai memiliki jumlah

penduduk 4.019 jiwa (Tahun 2017) berdasarkan data kependudukan milik Desa yang terbagi dalam 6 dusun. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.076 dan penduduk laki-laki 1.943 dan 100% beragama Islam seperti tabel dibawah ini.

Hasil wawancara yang berhubungan dengan implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa. Dalam hal ini peneliti mawawancarai Kepala Desa, BPD, BUMDes dan masyarakat. Adapun wawancara dengan kepala Desa sebagai berikut:

“Langkah yang sudah kami jalankan adalah membentuk BUMDes karena UU sudah mengitursikan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat salah satunya adalah BUMDes. BUMDes sudah ada sejak 2007, hanya bergerak diunit simpan pinjam. BUMDes sekarang dipemerintahan saya, kami membentuknya 2015 karena perkembangannya tidak baik maka kami membentuk ulang ditahun 2017, Alhamdulillah BUMDes sekarang berjalan dengan baik walaupun tidak maksimal. Pembentukan BUMDes saat itu dihadiri oleh semua tokoh masyarakat dan disepakati berdasarkan musyawarah Desa. Anggaran yang kami tetapkan untuk BUMDes Rp.50.000.000. Pengawasan yang kami jalankan dengan BPD adalah langsung turun lokasi untuk memnatau penggemukan sapi, dan mengevaluasi dikantor Desa untuk program simpan pinjam dan pengadaan pestisida. Menurut saya setelah dibentuk BUMDes sudah ada pengembangannya untuk perekonomian Desa yaitu BUMDes membantu masyarakat yang punya usaha mikro seperti simpan pinjam dan membantu petani menyediakan pestisida dengan harga dibawah harga pasar dan penggemukan sapi sudah ada pemasukan PADes” (Wawancara, 24 November 2018).

a. Penggemukan Sapi

Penggemukan sapi adalah usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes sebagai upaya mempercepat pertumbuhan sapi. Prinsip umum beternak sapi yang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan adalah dengan cara penggemukan. Wawancara dengan Bapak Najamudin selaku ketua BUMDes kaitan dengan penggemukan.

“Tahun 2017 Desa dengan seluruh elemen masyarakat melakukan musyawarah untuk membentuk BUMDes yang baru karena kepengurusan BUMDes yang lama tidak berjalan. Anggaran untuk BUMDes sebesar Rp 30.000.000 juta dengan angaran tersebut kami mengadakan pemeliharaan/ penggemukan sapi lokal 4 ekor dengan harga Rp 5.000.000/ ekor. Setelah 4 bulan, kami menjualnya seharga Rp 7.000.000 sampai 7.500.000. Dari hasil pemeliharaan tersebut masing-masing satu ekor sapi kami meraut keuntungan 2 sampai 2,5 juta/ ekor. Karna pada saat penjualan sapi

tersebut kami menjualnya 1 minggu sebelum Idul Adhar. Hasil dari penjualan tersebut kami mengadakan rapat dengan kepengurusan BUMDes akan menyampaikan hasil penjualan kepada kepala Desa, karna BUMDes bentuknya system bagi hasil kami diberikan Rp.2.500.000.” (Kamis-Jumaat 22-23 november 2018)

Hasil wawancara di atas menggambarkan adanya perkembangan yang cukup baik terhadap implementasi BUMDes Sai. Program penggemukan sapi, BUMDes mendapatkan perkembangan yang cukup baik karena hasil wawancara dengan ketua BUMDes cukup signifikan, dan pengelolaannya terarah. Hasil program pertama cukup membantu pemasukan PAD. Dari jumlah 4 Sapi Desa meraut keuntungan atau pemasukan PAD sebesar Rp. 8.500.000 dan dikurangi upah yang diberikan Rp. 2.500.000 kepada BUMDes. Jadi keuntungan atau PADesa 6.000.000. dan sisa dari anggaran yang dibelanjakan dengan program penggemukan Sapi 10.000.000.

b. Pengadaan Obat-obatan (Pestisida)

Salah satu tujuan pendirian BUMDes adalah untuk menggali potensi Desa atau kekayaan Asli Desa. Berangkat dari tujuan pendirian tersebut maka BUMDes yang ada di Desa Sai mengadakan pendistribusian Obat-Obatan (pestisida) karena pada dasarnya masyarakat Desa Sai mayoritas petani. Wawancara dengan Bapak Najamudin selaku ketua BUMDes kaitan dengan pengadaan Obat-Obatan.

“Setelah dinilai sukses oleh pemerintah Desa dari program penggemukan Sapi kami diberikan modal untuk mendistribusikan pestisida (obat-obatan) bawang merah dengan anggaran Rp. 20.000.000 dan ditambah dengan uang sisa pembelian sapi sehingga berjumlah Rp. 30.000.000, jenis obat-obatan yang kami belanjakan bermacam-macam, mulai dari dupont lanate, roundup, dupont preza. System pembelian oleh masyarakat adalah kredit akan dibayar setelah panen raya masyarakat Sai. Jumlah obat-obatan yang kami belanjakan Rp.25.000.000 sisa dari anggaran tersebut Rp.5.000.000. Sampai sekarang untuk keuntungan kami belum bisa memastikan karena masih ada yang belum selesai pembayarannya. Dan kami sampai hari ini masih melakukan penagihan terhadap masyarakat yang melakukan kredit pestisida.” (Kamis-Jumaat 22-23 november 2018).

Setelah dinilai baik perkembangannya Desa memberikan anggaran Rp. 20.000.000 untuk pengadaan obat-obatan, habis belanja untuk pestisida Rp. 25.000.000. Sisa dari anggaran pembelian obat-obatan Rp.5.000.000. Bentuk pembelian konsumen pestisida tersebut dengan system kreditan. Sampai saat ini masih dilakukannya penagihan terhadap masyarakat yang kredit. Perkembangan program dibidang pengadaan obat-obatan tidak maksimal karena kesadaran masyarakat yang tidak memperhatikan waktu pengkreditan.

c. Simpan Pinjam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD. Wawancara dengan Bapak Najamudin selaku ketua BUMDes:

“Adapun program yang ketiga ditahun 2017 adalah simpan pinjam kepada masyarakat yang ingin menambah modalnya atau untuk modal awal, seperti kios dan warung kopi. Dana simpan pinjam tersebut adalah sisa dari anggaran pembelian pestisida Rp.5.000.000. Simpan pinjam tersebut kami kadang mengambil bunganya kadang juga tidak, alasannya karena usaha yang dilakoni masyarakat kadang tidak berkembang, yang kami ambil bunganya adalah pedangan yang baik perkembangannya, dari 5 kios yang kami pinjamkan hanya 2 kios dan warung kopi, kami ambil bunganya sebesar 10%. Dengan pinjaman 1 juta per kios. Dan 3 kios yang dinilai tidak baik perkembangannya kami hanya mengambil besaran uang yang dipinjam. Sebenarnya saya didatangi ada 11 masyarakat yang ingin meminjam tapi karna dana tidak cukup maka hanya 5 orang yang kami kasih” (Kamis,jumaat-22-23 Novemeber 2018).

Penjelasan diatas disampaikan, pelaksanaan simpan pinjam hanya 2 unit kios yang bagus perkembangannya, pada dasarnya indikator perkembangan usaha tergantung manajemen pengelolaan, seperti jumlah pengeluaran dan pemasukan harus diakumulasikan dengan baik agar pengelolaannya terarah. Sampai sekarang BUMDes sudah final dalam penagihannya. Program simpan pinjam ini mendapatkan keuntungan Rp.200.000 dari 2 kios yang dinilai sukses dengan bunga 10% dari pinjaman 1 juta tersebut. Indikator perkembangannya cukup baik karena BUMDes tetap mengupayakan perkembangan seperti laba/untung.

Paparan diatas juga menggambarkan pembentukan BUMDes, belum bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana, dari 11 orang yang membutuhkan, BUMDes hanya bisa membantu 5 orang untuk dana simpan pinjam.. Untuk memahami kondisi tersebut sebagaimana paparan ketua BPD(Azhar) sebagai berikut:

“BUMDes dibentuk tahun 2015 karena programnya tidak ada yang dijalankan maka kami membentuk ulang ditahun 2017, Adapun program yang sudah kami evaluasi dengan kepala desa program BUMDes 1. Penggemukan sapi 2. Pengadaan pestisida 3. Simpan pinjam Dalam hal megawal kinerja BUMDes kami pada saat pemeliharaan sapi di Desa Sai khususnya didusun Jati. Kami saat itu turun memantau keadaan dilapangan bersama kepala Desa. Kepala Desa sebagai Pembina dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk kunjungan 2 kali seminggu di tempat pemeliharaan sapi, anggaran yang ditetapkan dimusrembangdes untuk program sebesar

Rp.50.000.000 juta. Dari beberapa program yang kami tanyakan, simpan pinjam dan kredit pestisida yang tidak baik perkembangannya.” (Senin 26 november 2018).

Penjelasan BPD, dari proses pengawasan terhadap pelaksanaan BUMDes ketua BPD untuk pengujungnya dilapangan sangat baik, dikarenakan langsung memantau proses penggemukan sapi dan mengevaluasi program lain dalam bentuk bersurat ke Desa setelah Desa menerima surat dari BPD, Desa memanggil BUMDes untuk mengevaluasi dikantor kepala Desa Sai. Ada ketidak samaan yang disampaikan oleh BUMDes dengan ketua BPD begitupun dengan kepala Desa mengenai anggaran. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata uang baru cair Rp.30.000.000 sisa Rp.20.000.000 juta akan diklarifikasi oleh kepala Desa Dan BPD ke bendahara Desa.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Sai Rusman adalah sebagai berikut:

“BUMDes sangat bagus menurut saya dibentuk karna saya dengar sebagai kios atau usah untuk pemasukan Desa. Dari pemantauan kami program yang dijalankan oleh BUMDes perkembangannya kurang baik, karena kinerja dari BUMDes kami lihat tidak maksimal dalam upaya menjalankan program yang direncanakan seperti acuh tak acuh”. (24 november 2018)

Wawancara di atas menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap pembentukan BUMDes. Keadaan BUMDes yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan program, seperti acuh tak acuh. Apabila tindakan ini berlangsung lama akan berdampak pada tidak maksimalnya program yang direncanakan.

2. Kendala Implementasi BUMDes terhadap Pengembangan Perekonomian di Desa Sai

Hasil observasi dilakukan dari tanggal 19 November sampai 20 Desember 2018 oleh peneliti di Desa Sai Kecamatan Soromandi, diperoleh beberapa hal yang menyangkut kendala Implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa, beberapa pemantauan yang dilakukan oleh peneliti adalah kendala yang dihadapi oleh BUMDes. 1. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala Desa terhadap BUMDes. 2. Anggaran yang ditetapkan minim yang berakibat tidak maksimalnya program yang diimplementasikan seperti simpan pinjam masih ada masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk usaha baik berupa penambahan modal maupun modal awal dan pengadaan pestisida yang masih kurang terhadap permintaan masyarakat. 3. Kesadaran Masyarakat disini ada dua factor yang pertama kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengusulkan ide untuk kegiatan dan yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak memperhatikan tanggal pengembalian pinjaman, 4. Tidak seriusnya BUMDes dan Pemerintah Desa dalam

memaksimalkan program Bumdes sehingga BUMDes tidak maksimal dalam memanfaatkan anggaran BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara yang berhubungan dengan beberapa kendala implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa Sai. Hasil wawancara menunjukan bahwa beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes pembinaan/pelatihan yang tidak pernah dilakukan kepada BUMDes, Pakan Ternak, Kesadaran masyarakat, anggaran yang minim.

1. Pembinaan/ Pelatihan

Pembinaan/pelatihan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk melakukan bimbingan atau arahan agar menjadi seseorang yang mandiri, sadar, dan baik. Peneliti mewawancarai ketua BUMDes Najamudin sebagai berikut:

“BUMDes mendapatkan kendala yang cukup banyak salah satunya yang paling penting adalah pembinaan dan pelatihan kepada kami yang tidak pernah dilakukan oleh kepala Desa, setelah dibentuk kami dibiayarkan begitu saja, dan allhamdulillah walaupun tidak adanya pelatihan dari desa kami sudah menjalankan program yang labanya cukup baik”. (Kamis, Jum’at, 22-23 November 2018).

Setelah diwawancarai kendala yang paling urgen adalah pembinaan kepala Desa terhadap BUMDes, karna pada prinsipnya kepala Desa merupakan Pembina/penasehat yang diatur dalam Peraturan menteri Nomor 4 Tahun 2015. Pembinaan merupakan bentuk tanggung jawab kepala Desa terhadap undang-undang.

2. Pengadaan Pakan Ternak

Pakan adalah segala jenis yang bisa dimakan oleh ternak sebagai sumber energy dan zat-zat gizi agar proses penggemukannya maksimal dan tidak mengganggu kesehatannya. Beberapa macam pakan yang biasa diberikan sebagai makanan ternak sapi, rumput segar, gabah, daun pisang. Wawancarai ketua BUMDes Najamudin sebagai berikut:

“Kendala pengadaan pakan, karna kondisi Desa Sai yang suhunya cukup panas sehingga pada bulan Mei kami memulai penggemukan sapi saat itu sudah musim kemarau, rumput dan sebagainya sulit kami dapatkan, begitupun gabah dan jenis pakan lainnya, alternatifnya kami mengambil sisa gabah yang tidak dipake oleh masyarakat disekitar persawahan Desa Sai”. (Kamis, jumaat-22-23 November 2018).

Penjelasan diatas menunjukan sangat sulitnya jangkauan BUMDes terhadap pakan ternak seperti rumput. Karna curah hujan mulai dari April khususnya dibima cukup rendah. Sebagai alternatifnya BUMDes mengambilnya diberbagai sawah masyarakat, sisa gabah yang tidak dipakai oleh petani.

3. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran, merupakan tolak ukur maksimalnya program yang direncanakan. Sadar artinya merasa tau atau ingat kepada keadaan yang harus dilakukan yang sebenarnya. Peneliti mewawancarai ketua BUMDes Najamudin sebagai berikut:

“Setelah terbentuk kepengurusan, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, program yang sudah disusun oleh pengurus BUMDes, tujuannya agar masyarakat dapat memberikan masukan terhadap program yang kami jalankan nantinya, misalnya penggemukan sapi apa saja yang harus kami lakukan, dan setelah kami pinjamkan uang berdasarkan kesepakatan banyak yang kurang memperhatikan waktu untuk pengembalian pinjaman. Dan pembayaran kreditpun begitu tidak memperhatikan tanggal pengembalian” (Kamis,jumaat-22-23 Novemeber 2018)

Penjelasan ketua BUMDes salah satu hambatan yang dirasakan adalah tidak ada partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BUMDes, tujuan dilakukannya sosialisasi oleh BUMDes salah satunya adalah agar masyarakat bisa memberikan masukan terhadap apa saja yang harus dilakukan oleh pengurus BUMDes, contoh program seperti penggemukan sapi, program penggemukan tersebut, pakan apa saja agar maksimalnya pertumbuhan dan terhindar dari penyakit. Dan yang kedua kesadaran masyarakat tidak tepatnya pembayaran atau pengembalian pinjaman uang dan kredit pestisida.

4. Anggaran yang Ditetapkan Minim

Pelaksanaan sebuah program yang berbentuk fisik, salah satu indikatornya adalah Dana/anggaran. Anggaran BUMDes merupakan alokasi dari dana Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala Desa bersama dengan BPD.

Wawancara dengan ketua BUMDes Najamudin sebagai berikut:

“Seperti yang saya sampaikan tadi anggaran yang diberikan kepada kami BUMDes sebesar Rp.30.000.000. dari evaluasi program yang kami jalankan seperti simpan pinjam misalnya itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan tapi karena dana tidak cukup, program simpan pinjam hanya bisa membantu 4 orang, belum lagi masalah pengadaan obat-obatan dan penggemukan sapi itu masih minim sekali”. (Kamis,jumaat-22-23 Novemeber 2018).

Pada dasarnya anggaran adalah hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan program, karna BUMDes adalah usaha yang salah satunya sumber pendapatan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang, bertujuan untuk memudahkan transaksi masyarakat dan membantu kegiatan perekonomian masyarakat. Anggaran yang sudah dianggarkan kurang memadai terhadap permintaan simpan pinjam dan pengadaan pestisida. Karena permintaan jenis dan kuantitas pestisida cukup tinggi dilindungi petani Desa Sai karena sember

pencairan masyarakat adalah petani seperti bawang merah dan jagung.

Wawancara dengan masyarakat (Rusman) sebagai berikut:

“Kami mengetahui tentang bumdes setelah dikabarkan oleh pemerintah Desa ke kami dan informasi dari ketua bumdes najamudin. Saya melihat berkembang kurang baik untuk bumdes setahu saya ada masyarakat yang kecewa karena ada yang ingin meminjam uang BUMDes tapi tidak cukup anggaran itu kata bumdes yang saya dengar”. (Minggu 25 November 2018)

Penjelasan masyarakat diatas menggambarkan sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes cukup baik. Kekurangan yang disampaikan tersebut berkaitan dengan kekurangan anggaran yang dianggarkan Desa untuk BUMDes, karna prinsip terbentuknya BUMDes untuk membantu ekonomi masyarakat Desa.

D. TEMUAN DAN DISKUSI

Implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kepala Desa, dan BUMDes untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa salah satunya adalah membentuk BUMDes. Program BUMDes yang sudah diimplementasi oleh pengurus BUMDes adalah penggemukan sapi yang sudah dijual dan mendapatkan hasil yang cukup baik untuk pemasukan PADes karena pertimbangannya BUMDes baru dibentuk beberapa bulan sudah mendapatkan hasil yang cukup baik, begitupun dibidang pengadaan pestisida dan simpan pinjam sudah membantu perekonomian masyarakat. Adapun data dokumentasi struktur BUMDes dan struktur pemerintah Desa Sai.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan kesempatan dan peluang yang sangat baik untuk perbaikan perkembangan ekonomi Desa. Undang-Undang mengamanatkan Desa harus membentuk BUMDes dan dikelola dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, tujuannya untuk menggali potensi Desa dan sebagai pemasukan PADes. Pemerintahan Desa harus menjalin hubungan kerjasama dengan BPD untuk mengelola BUMDes, Kerjasama dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APBdesa, upaya tersebut dapat membantu pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana Desa[16].

BUMDes dibentuk berdasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat dan dijalankan oleh masyarakat asli Desa Sai, bergerak dipedesaan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat Desa. Berkenaan dengan tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk mengembangkan potensi Desa. Cara pandang tersebut pengurus BUMDes harus orang-orang paham terhadap keadaan masyarakatnya dan memahami potensi Desa.

BUMDes Sai sudah mampu menjalankan proram dengan baik, Hal ini dapat dilihat mulai dari pembentukan BUMDes sampai Hasil yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Sai. Program BUMDes cukup membantu keadaan masyarakat karna pada prinsipnya terbentuknya BUMDes untuk menggali potensi Desa guna membantu perekonomian masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan mayoritas pencarian masyarakat di Desa Sai adalah petani, nelayan, ternak. Untuk menjawab kebutuhan petani BUMDes menjalankan Pogram penggemukan sapi, pengadaan pestisida untuk membantu petani yang ekonomi lemah dengan harga dibawah harga pasar dan simpan pinjam guna membantu modal masyarakat yang membutuhkan modal awal atau modal tambahan.

Pemerintah Desa Sai (arti luas) dengan BUMDes Sai tidak bersinergi dengan baik dalam mengelola anggaran BUMDes, kepala Desa harus mengoptimalkan pem binaan kepada BUMDes. dan harus mengadakan pelatihan khusus kepada BUMDes guna tercapainya BUMDes yang mandiri dan kreatif terhadap pengelolaan potensi Desa. Di lihat dari interkasi BUMDes yang kurang Baik seperti kejadian masalah anggaran yang belum cair sebagiannya. BUMDes pula perlu meberikan aspirasi kepada BPD dan kepala Desa karna anggaran yang disalurkan tidak cukup memadai untuk program, misalnya penggemukan sapi hanya bisa dilakukan oleh BUMDes 4 ekor sapi, pengadaan pestisida hanya 3 macam yang bisa disediakan padahal kebutuhan merek obat (pestisida) bermacam-macam yang dibutuhkan oleh petani. Simpan pinjam tidak bisa membantu masyarakat yang mebutuhkan karena kurangnya Dana sehingga BUMDes hanya bisa membantu 4 orang (kios). Kepala Desa kedepanya agar memerhatikan Dana yang dibutuhkan oleh BUMDes untuk membantu pengembangan per-ekonomian masyarakat.

Program yang dilaksanakan oleh BUMDes ini dapat mendorong semangat masyarakat baik dibidang peternakan, pertanian, dan wirausaha. Seperti penggemukan sapi ini akan memacu semangat masyarakat yang peternak sapi karna melihat hasil yang sudah dilakukan oleh BUMDes, dan pengadaan pestisida akan mempermudah jankauan petani terhadap mahalnya harga pestisida dipasar, simpan pinjam juga akan sangat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha maupun penambahan modalnya. Penyelenggara pemerintah Desa Sai diharapkan mampu memanfaatkan potensi Desa lewat Badan Usaha Milik Desa yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang.

Hal ini pemerintah Desa dan BUMDes harus berupaya mengembangkan potensi lainnya, karena dilihat dari wilayah geografisnya Desa Sai sebelah barat adalah gunung sebelah timur adalah laut lepas. Di dalam pemukiman warga itu terdapat lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan. Upaya kepala Desa sebagai

Pembina dan BUMDes sebagai badan operasional untuk menggali potensi yang ada. Untuk mencapai hal tersebut pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan BUMdes penyelenggaraan yang sinergi dan transparan.

Terkait kendala kendala yang dihadapi oleh BUMDes terutama pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala Desa terhadap BUMDes, anggaran yang ditetapkan minim yang berakibat tidak maksimalnya program yang diimplementasikan sepeti simpan pinjam masih ada masyarakat yang mebutuhkan pinjaman untuk usaha baik berupa penambahan modal maupun modal awal dan pengadaan pestisida yang masih kurang terhadap permintaan masyarakat. Demikian juga kesadaran masyarakat disini ada dua factor yang pertama kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengusulkan ide untuk kegiatan dan yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak memperhatikan tanggal pengembalian pinjaman, serta tidak seriusnya BUMDes dan Pemerintah Desa dalam memaksimalkan program Bumdes sehinga BUMDes tidak maksimal dalam memanfaatkan anggaran BUMDes. Jadi implementasi BUMDes mengalami kendala terutama kebijakan otonomi desa yang termuat dalam Undang-Undang Desa akan tetapi, tidak selamanya kebijakan tersebut tidak sama dengan implementasinya, namun harus ada cara efektif dalam mengelola BUMDes untuk mewujudkan desa mandiri. Hal itu sejalan dengan pendapat bahwa upaya Pemerintah Desa melalui BUMDes untuk mewujudkan desa mandiri juga menghadapi kendala sosial yang terjadi yaitu munculnya kecemburuan antardukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan, serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan. Sejatinya pelaku ekonomi desa wisata diutamakan warga desa yang berekonomi lemah[3]. Karena tujuan utamanya pengelolaan BUMDes mampu menyejahterakan warga kurang mampu agar lebih mandiri dan sejahtera.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi BUMDes terhadap perkembangan perekonomian Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari Tiga program BUMDes yang sudah dilaksanakan, seperti penggemukan sapi, pengadaan pestisida, simpan pinjam, sudah dapat memberikan dampak yang cukup baik terhadap perkembangan perekonomian Desa.

Kendala yang dihadapi oleh BUMDes seperti 1. Pembinaan/ pelatihan kepala Desa kepada BUMDes, 2. Pakan ternak yang kurang terjangkau, 3. Kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program dan kesadaran masyarakat yang kurang memperhatikan pengembalian pinjaman, kreditan, 4. Anggaran yang minim menghambat pengembangan program BUMDes.

Saran bagi Pemerintah Desa Sai agar melakukan pembinaan yang baik terhadap BUMDes dan melakukan sosialisasi yang serius kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada program BUMDes. Harapannya agar bertindak tegas terhadap aparatur dan BUMDes yang bekerja tidak maksimal.

Pemerintahan Desa Sai dan BUMDes dalam melaksanakan program diharapkan bersinergi. Dan melakukan studi program ke Desa lain yang dinilai oleh pemerintah kabupaten Bima maksimal dalam penyelenggara BUMDes seperti salah satu Desa yang ada Di kecamatan Sape Kabupaten Bima. BPD dalam melaksanakan pengawasan harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas sebagai badan legislative. BUMDes juga harus serius dalam mengelola anggaran yang ditetapkan oleh Desa dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu memberikan dukungan dana masukan kepada penulis sehingga artikel ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] M. Akbar, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- [2] N. Zulkarnaen and M. Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Civicus*, vol. 6, no. 1, pp. 26–34, 2018.
- [3] F. Sidik, "Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian Desa," *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 19, no. 2, pp. 115–131, 2015.
- [4] A. E. Trisnawati, H. Wahyono, and C. Wardoyo, "Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal," *J. Pendidik. Teor. Penelitian, dan Pengemb.*, vol. 3, no. 1, pp. 29–33, 2018.
- [5] R. Indonesia, "Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa," *Jakarta Sekr. Negara*, 2014.
- [6] R. R. Garis, "Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis)," *MODERAT J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 2, pp. 108–130, 2017.
- [7] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- [8] I. Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Edisi kesatu, Cetakan keempat," *PT. Bumi Aksara. Jakarta*, 2016.
- [9] L. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet," *Ke-13, h*, vol. 111.
- [10] M. N. Purwanto, *Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran*. Remaja Rosdakarya, 2000.
- [11] D. Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D," *Alf. Bandung*, 2010.
- [12] M. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,*

Tindakan Kelas & Studi Kasus. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

- [13] A. Suharsimi, "Prosedur Suatu Pendekatan Praktek," *Jakarta PT. Rineka Cipta*, 2006.
- [14] G. Imam, "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik," *Jakarta Bumi Aksara*, 2013.
- [15] M. B. Miles and A. M. Huberman, "Qualitative Data Analysis (terjemahan)." Jakarta: UI Press, 2007.